

ABSTRAK

Di masa pandemi menyebabkan berbagai dampak salah satunya ialah ketenagakerjaan. Saat ini banyak perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Penyebabnya perusahaan sudah tidak mampu membayar gaji dan tidak memberikan pesangon terhadap karyawannya. Oleh sebab itu, pekerja yang di PHK mengajukan permohonan pailit. Pekerja adalah kreditur preferen yang dilindungi haknya oleh UU Kepailitan dan UU Cipta Kerja. Permasalahannya di masa pandemi ini, pekerja yang kehilangan hak-hak operasionalnya dapatkah mengajukan permohonan kepailitan serta mendapatkan haknya sesuai dengan UU Cipta Kerja. Pekerja memerlukan kepastian hukum dan perlindungan hukum atas hak yang seharusnya diperoleh.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan tipe penelitian perspektif. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pengumpulan data yang dilakukan dengan studi kepustakaan dan *online research*. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari berbagai undang-undang serta bahan hukum sekunder yang meliputi buku serta jurnal hukum yang meliputi bidang kepailitan dan ketenagakerjaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di masa pandemi ini pekerja sebagai kreditur preferen bisa mengajukan permohonan pailit. Sesuai dengan syarat materiil permohonan pailit terdapat dua atau lebih kreditur serta terdapat utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dengan memenuhi syarat tersebut, pekerja bisa mengajukan permohonan pailit. Dalam UU Cipta Kerja, kedudukan yang diperoleh pekerja ialah kreditur preferen. Pemenuhan hak pekerja yang diperoleh ialah mengenai upah. Pengajuan permohonan pailit yang dilakukan oleh pekerja bisa menggunakan tanpa adanya Putusan PHI, sebab Pasal 28 Permenaker 33/2016 menjadi dasar pekerja untuk melakukan pengajuan permohonan pailit.

Kata kunci : Kepailitan, Permohonan Kepailitan, dan Pekerja yang di PHK.

ABSTRACT

Nowadays pandemic causes various impacts, one of which is employment. Currently, many companies are making unilateral termination of employment. It is because the company is no longer able to pay salaries and does not provide severance pay for employees. Therefore, workers who have been laid off apply for bankruptcy. Workers are preferred creditors whose rights are protected by the Bankruptcy Law and the Job Creation Law. The problem is that during this pandemic, workers who have lost their operational rights can apply for bankruptcy and obtain their rights in accordance with the Job Creation Law. Workers need legal certainty and legal protection for their rights that should be obtained.

This research is a normative research with perspective research type. The problem approach used is a statutory approach and a conceptual approach. Data collection was carried out by means of library research and online research. This research used primary legal materials consisting of various laws and secondary legal materials including books and legal journals covering the fields of bankruptcy and employment.

The results of this study indicate that during this pandemic, workers as preferred creditors can apply for bankruptcy. In accordance with the material requirements of the application for bankruptcy, there are two or more creditors and there are debts that are due and can be collected. By fulfilling these requirements, workers can apply for bankruptcy. In the Job Creation Law, the position obtained by workers is the preferred creditor. Fulfillment of workers' rights is about wages. Submission of bankruptcy applications made by workers can be used without the PHI Decision, because Article 28 Permenaker 33/2016 is the basis for workers to submit bankruptcy applications.

Keywords : Bankruptcy, Application for Bankruptcy, and Workers who were laid off.